

PEMBERDAYAAN SATLINMAS OLEH SATPOL PP DALAM MENYUKSESKAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Silvany

NPP. 32.0952

Asal Pendaftaran Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: fanysilvany7@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad Suhardi, S.H, M.H

ABSTRACT

Background: Regional Head Elections (Pilkada) are a crucial part of the democratic process, requiring active participation from various parties in maintaining public order and security, including the Civil Service Protection Unit (Satlinmas). In Bombana Regency, Satlinmas plays a strategic role in supporting the smooth implementation of Pilkada. However, the empowerment of Satlinmas by the Municipal Police Unit (Satpol PP) still faces challenges in terms of resources, opportunities, knowledge, and skills. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the extent to which Satpol PP has empowered Satlinmas in ensuring the success of Pilkada in Bombana Regency. **Method:** This study uses a qualitative research method with the empowerment theory of Sumadyo in Mardikanto, and data were collected through observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings show that the empowerment of Satlinmas has not been optimal. Infrastructure and facilities are still limited, training is uneven, understanding of roles and duties remains low, and the technical skills possessed are inadequate. The obstacles encountered include limited budget, weak inter-agency coordination, and the absence of sustainable coaching. **Conclusion:** strategic and continuous efforts are required to empower Satlinmas so that they can fully carry out their role in maintaining public order and supporting the success of Pilkada.

Keywords: Empowerment, Satlinmas, Pilkada, Satpol PP, Bombana Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang menuntut partisipasi aktif berbagai pihak dalam menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Di Kabupaten Bombana, keberadaan Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran Pilkada. Namun, pemberdayaan Satlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menghadapi tantangan dari segi sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan Satlinmas dilakukan oleh Satpol PP dalam menyukseskan Pilkada di Kabupaten Bombana. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Sumadyo dalam Mardikanto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Temuan yang ditemukan penulis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Satlinmas belum berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana masih terbatas, pelatihan belum merata, pemahaman terhadap peran dan tugas masih rendah, serta keterampilan teknis yang dimiliki belum memadai. Hambatan yang dihadapi antara lain minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan. **Kesimpulan:** Diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan

dalam memberdayakan Satlinmas agar dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga ketertiban dan menyukseskan Pilkada.

Kata kunci: Pemberdayaan, Satlinmas, Pilkada, Satpol PP, Kabupaten Bombana

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari demokrasi lokal di mana masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu memahami dan menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan lokal. Pemimpin daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih kontekstual, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Pemimpin yang terpilih diharapkan dapat memberikan suatu sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat untuk hidup secara wajar adalah tujuan utama pembentukan pemerintahan. Pemerintah didirikan untuk membantu orang lain, bukan diri mereka sendiri; mereka membangun lingkungan di mana setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan inovasi mereka untuk kemajuan Bersama Seperti yang dinyatakan oleh Rasyid dalam Labolo (Labolo M, 2013).

Namun, persiapan menuju pilkada serentak bukan tanpa tantangan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menempatkan proses pemilihan umum sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan yang transparan dan partisipatif (Nugroho, 2023). Namun demikian, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih, meningkatnya potensi konflik horizontal antarpendingung pasangan calon, dan ancaman terhadap stabilitas ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi sangat penting. Satlinmas sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat memiliki fungsi utama dalam membantu menciptakan situasi yang aman dan tertib, terutama dalam tahapan-tahapan penting Pilkada seperti masa kampanye, distribusi logistik, dan hari pencoblosan (Evianny & Sutiyo, 2023).

Dilansir dari ANTARA News, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan Situasi Pilkada Serentak akan lebih rawan daripada pemilihan presiden atau legislative karena pemilih dan peserta pilkada memiliki kedekatan yang lebih dan diwarnai dengan unsur kekeluargaan dalam kompetisi. Pelaksanaan pilkada di Indonesia melibatkan ribuan daerah dengan kondisi yang beragam, sehingga isu-isu seperti keamanan, integritas, partisipasi, hingga netralitas penyelenggara pemilu dan aparat pengamanan menjadi perhatian penting. Pada satu sisi, pilkada harus dijaga agar berjalan dengan tertib dan damai, bebas dari intimidasi maupun konflik antarpendingung. Selain itu, masa kampanye sering kali menimbulkan risiko terhadap ketertiban umum akibat tingginya intensitas kegiatan politik dan antusiasme para pendukung. Di sinilah peran aparat terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), menjadi krusial. Mereka bertugas menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan masyarakat, terutama dalam mengawal jalannya pilkada agar tetap kondusif. Satpol PP dan Linmas memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dalam tahapan pilkada, mulai dari kampanye hingga hari pemungutan suara, berlangsung aman dan bebas dari gangguan yang berpotensi merusak proses demokrasi. Pilkada yang sukses, yang diiringi dengan pelaksanaan yang tertib dan damai, akan memberikan legitimasi kuat kepada para pemimpin daerah terpilih. Selain itu, keberhasilan pilkada juga berkontribusi pada stabilitas politik nasional. Dengan demikian, peran serta dari semua elemen, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci utama untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar dan

menghasilkan pemimpin yang berkualitas, serta dapat membawa daerah ke arah yang lebih baik, hal tersebut sejalan dalam konteks rural, International Journal of Rural Management menyatakan bahwa “keterlibatan warga dalam keamanan lokal dan peran aktif mereka dalam pemilihan umum akan memperkuat kepercayaan terhadap institusi publik dan mengurangi potensi konflik” (van der Meer & Hakhverdian, 2023). Sementara itu, jurnal Journal of Developing Societies menegaskan bahwa “peran masyarakat sipil yang aktif dalam keamanan lokal dapat memperkuat konsolidasi demokrasi dan mendorong terbangunnya legitimasi sosial terhadap proses pemilu” (Alagappa, 2023). Untuk mendukung upaya ketentraman dan perlindungan masyarakat selama pemilu, diterbitkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 27 Ayat 1, dijelaskan bahwa salah satu tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) adalah membantu dalam penanganan ketentraman ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Melihat pentingnya tugas Satlinmas dalam menyukseskan Pilkada, sangat penting untuk Melakukan pemberdayaan kepada anggota linmas. Pemberdayaan linmas sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 42 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan peningkatan, kapasitas anggota Satlinmas melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembinaan sikap dan prilaku serta kemampuan anggota Satlinmas dalam rangka Melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya. Kabupaten Bombana menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Pilkada yang berhubungan dengan peran Linmas (Perlindungan Masyarakat). Tantangan ini mencakup kesiapan dan pelatihan Linmas untuk menjalankan tugas dengan efektif, serta pentingnya koordinasi yang baik antara Linmas, kepolisian, dan penyelenggara pemilu untuk mengatasi situasi darurat. Selain itu, potensi konflik politik dan kerawanan sosial menjadi isu yang harus dihadapi, di mana Linmas perlu siap meredakan ketegangan di setiap Tempat pemungutan suara (TPS), sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu juga menjadi tugas penting Linmas, yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan anggaran. Untuk mendukung peran strategis Satlinmas dalam menjaga ketertiban selama proses pemilihan kepala daerah, pendistribusian personel Linmas di setiap kecamatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut sejalan dengan jurnal Public Administration and Policy yang menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif serta pemberdayaan aktor lokal yang berada di garda depan, seperti satuan perlindungan sipil, dapat meningkatkan legitimasi proses demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Abubakar et al. 2020) Selain itu dalam International Journal of Public Sector Management menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat dan lembaga lokal dalam menjaga stabilitas sosial selama pemilu dapat menurunkan angka konflik politik dan memperkuat kualitas pemilu (Wang, X., & van Wart, M, 2019)

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Satpol PP telah mendata jumlah Linmas aktif di seluruh kecamatan sebagai dasar perencanaan strategi pengamanan TPS. Data berikut menyajikan jumlah personel Linmas yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Bombana:

Tabel 1.1
Data Satlinmas tiap Kecamatan di Kabupaten Bombana

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH LINMAS
1	Kec. Mata Oleo	48 orang
2	Kec. Matausu	13 orang
3	Kec. Masaloka Raya	19 ora ng
4	Kec. Lantari Jaya	52 orang

5	Kec. Rumbia Tengah	42 orang
6	Kec. Rumbia	61 orang
7	Kec. Kabaena	22 orang
8	Kec. Kabaena Selatan	19 orang
9	Kec. Kabaena Barat	37 orang
10	Kec. Kabaena Timur	60 orang
11	Kec. Kabaena Tengah	40 orang
12	Kec. Poleang Barat	76 orang
13	Kec. Poleang Selatan	41 orang
14	Kec. Poleang	90 orang
15	Kec. Poleang Utara	63 orang
17	Kec. Poleang Tengah	25 orang
18	Kec. Tontonunu	35 orang
19	Kec. Poleang Tenggara	25 orang
20	Kec. Poleang Timur	61 orang
21	Kec. Rarowatu	44 orang
22	Kec. Rarowatu Utara	43 orang
JUMLAH		913 Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana, 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah personel anggota Linmas yang akan disiapkan dalam menyukseskan pilkada 2024 ini. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemberdayaan Satlinmas yang diterapkan oleh Satpol PP serta dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan memahami bagaimana pemberdayaan ini dilakukan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga Satlinmas dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung keamanan dan ketertiban selama Pilkada.. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pemberdayaan Satlinmas dan pelaksanaan Pilkada yang sukses, serta pentingnya kolaborasi antara Satpol PP, Satlinmas, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi demokrasi di Kabupaten Bombana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Pilkada serentak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya membutuhkan kesiapan dari penyelenggara dan peserta, tetapi juga dukungan dari aparat keamanan dan ketertiban, termasuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat bahwa Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu menjaga ketertiban umum selama Pilkada. Idealnya, anggota Satlinmas dibekali dengan pelatihan, keterampilan teknis, serta dukungan logistik yang memadai agar mereka siap bertugas di lapangan, terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kenyataannya, di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bombana, peran Satlinmas belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan anggota yang belum mendapatkan pelatihan yang layak, keterbatasan perlengkapan, serta minimnya dukungan kelembagaan dalam hal koordinasi dan evaluasi kinerja. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas sering kali bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Geraldo Wokas (2022) menemukan bahwa meskipun ada pelibatan Satlinmas di tingkat kelurahan, masih banyak

kekurangan dalam hal pelatihan dan dukungan anggaran. Sementara itu, Rio Valentino (2023) mencatat bahwa di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas, keberadaan Satlinmas bahkan belum diaktifkan secara fungsional. Padahal, dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut Sumadyo dalam Mardikanto (2021), keberhasilan sebuah program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Jika salah satu aspek ini tidak berjalan dengan baik, maka pemberdayaan tidak akan efektif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Norris et al. (2015), keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh partisipasi komunitas dalam menjaga integritas proses demokrasi. Selain itu, studi oleh Esponda & Pouliot (2022) menemukan bahwa pemberdayaan aktor lokal dalam sistem pengamanan pemilu dapat mendorong terciptanya kepercayaan publik dan memperkuat kohesi sosial selama tahapan pemilu.

Di Kabupaten Bombana sendiri masih banyak aspek dari model pemberdayaan tersebut yang belum terlaksana secara menyeluruh. Misalnya, pelatihan yang belum rutin dilakukan (bina manusia), minimnya dukungan logistik (bina usaha), kurangnya pemetaan wilayah rawan (bina lingkungan), serta belum kuatnya struktur organisasi dan koordinasi lintas sektor (bina kelembagaan). Kesenjangan ini menjadi penting untuk diteliti karena belum banyak kajian yang secara khusus mengangkat bagaimana Satpol PP sebagai pembina Satlinmas melaksanakan proses pemberdayaan yang terarah dan terukur dalam menghadapi Pilkada serentak. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menjawab celah tersebut dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang bentuk pemberdayaan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta strategi apa yang dapat diterapkan agar Satlinmas benar-benar siap dan berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada yang aman dan tertib

1.3. Penelitian Terdahulu

Mengakses Sumber informasi yang relevan, termasuk penelitian terdahulu, sangat penting dalam penelitian. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat argumen, meskipun dengan teori yang berbeda, serta memberikan wawasan tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dengan mengkaji studi sebelumnya, kesenjangan penelitian dapat teridentifikasi dan memperjelas kontribusi penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini di dorong oleh sejumlah studi terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan Satlinmas.

Penelitian pertama dilakukan oleh Geraldo Rival Wokas (2022) dengan judul "*Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*". Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana Satlinmas diberdayakan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban melalui sistem keamanan lingkungan. Menggunakan metode kualitatif dengan teori pemberdayaan dari Jim Ife, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dari pemerintah dalam mendukung kegiatan Satlinmas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rio Valentino (2023) yang berjudul "*Pemberdayaan Satlinmas Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*". Dengan menggunakan teori Tri Bina dari Sumadyo (2017), penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan Satlinmas belum terlaksana secara optimal. Beberapa kecamatan bahkan belum membentuk atau mengaktifkan satuan Satlinmas, sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan, sarana, dan anggaran yang memadai.

Penelitian Ketiga, Isnan Rasyidi (2021) meneliti "*Pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 di Kecamatan Pangkalan Kerinci*". Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pemberdayaan Satlinmas dalam menangani kasus-kasus

gangguan ketertiban masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas belum optimal, disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait Permendagri tersebut dan kurangnya pelatihan serta pendidikan bagi anggota Satlinmas.

Penelitian keempat oleh Karina S.A., Faraba, Herri, dan Faruq Alhasbi (2024) dengan judul "*Literasi Istilah Politik dalam Peningkatan Keterampilan Satlinmas Pemilu 2024 di Desa Wadunggetas*", menyoroti pentingnya pemahaman terhadap istilah politik dalam meningkatkan peran Satlinmas selama pemilu. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi dan menunjukkan bahwa kegiatan literasi berjalan dengan baik berkat dukungan dari lembaga terkait seperti Bawaslu, sehingga Satlinmas dapat berkoordinasi lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir, penelitian oleh Rahmad Alfajri (2023) dalam skripsi, berjudul "*Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Desa Karang Bindu, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan*", menggunakan teori *capacity building* dari Grindle (1997). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas belum optimal karena terbatasnya sumber daya dan fasilitas pendukung yang tersedia.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemberdayaan Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, baik dalam kegiatan rutin maupun dalam konteks pesta demokrasi seperti pemilu. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih sistematis dan menyeluruh untuk memaksimalkan peran Satlinmas di masa depan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dimana penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian pemberdayaan Satlinmas karena secara spesifik menyoroti peran strategis Satpol PP dalam membina dan memberdayakan Satlinmas untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bombana, sebuah daerah yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada fungsi Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum secara umum, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan Tri Bina (Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan) untuk menilai secara komprehensif proses pemberdayaan Satlinmas dalam konteks pesta demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tantangan spesifik seperti minimnya anggaran, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor yang menjadi hambatan nyata dalam pemberdayaan Satlinmas, serta upaya solutif dari Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut, yang belum banyak dijelaskan dalam studi sebelumnya

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Bombana. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan, seperti pelatihan, pembinaan, dan penyediaan sarana pendukung yang diberikan kepada anggota Satlinmas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyukseskan Pilkada Serentak di Kabupaten Bombana. Pendekatan ini juga sesuai untuk meneliti peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi secara alami dan tidak dimanipulasi

oleh peneliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2019). Metode penelitian kualitatif juga dilandasi filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh makna sehingga penelitian dilaksanakan lebih mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif menawarkan fleksibilitas dalam desainnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kaku, penelitian kualitatif memungkinkan penyesuaian rencana penelitian berdasarkan situasi dan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara semiterstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait dan literatur pendukung lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memahami persoalan yang diteliti. Teknik ini kemudian dikembangkan melalui snowball sampling, yakni penentuan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (human instrument) yang menentukan arah penelitian, melakukan pengumpulan data, dan menganalisis informasi yang diperoleh (Nasution, 1988).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model induktif, yaitu menyusun data dari temuan lapangan menjadi pola-pola atau tema yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif proses pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam konteks penyelenggaraan Pilkada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP di Kabupaten Bombana dengan menggunakan teori dari Sumadyo dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (2021: 113). Dalam buku tersebut, Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Namun, Mardikanto menambahkan aspek Bina Kelembagaan karena ketiga aspek tersebut hanya dapat tercapai jika didukung oleh keberhasilan berbagai lembaga yang diperlukan.

3.1. Bina Manusia

Pemberdayaan dalam aspek bina manusia merupakan prioritas utama yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kesiapan dan kompetensi seluruh anggota Satlinmas menjelang Pilkada Serentak Hal ini sejalan dengan kajian dalam jurnal *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, yang menyebutkan bahwa “pemberdayaan aktor lokal dalam tata kelola publik berkontribusi pada meningkatnya akuntabilitas serta responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga” (Brinkerhoff, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota Satlinmas yang berjumlah 913 orang dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bombana telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan secara terpusat di ibu kota kabupaten, yakni di Kota Rumbia.

Pelatihan terpusat ini dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, dan pihak Kepolisian Resor Bombana. Materi pelatihan meliputi berbagai aspek penting, di antaranya: pemahaman tentang tugas dan fungsi Satlinmas dalam pengamanan TPS, etika dan sikap netral dalam pemilu, tata cara pengamanan logistik pemilu, komunikasi efektif dengan masyarakat, serta penanganan awal potensi konflik atau gangguan

ketertiban. Pendekatan pelatihan dilakukan secara klasikal dan praktik simulasi, dengan menghadirkan pemateri dari masing-masing lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

Pelaksanaan pelatihan secara terpusat ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain: penyampaian materi yang seragam, pengawasan dan monitoring yang lebih mudah, serta peningkatan rasa tanggung jawab dan kebersamaan antaranggota Satlinmas dari berbagai kecamatan. Namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam aspek logistik dan transportasi. Beberapa anggota Satlinmas yang berasal dari kecamatan terjauh seperti Kabaena dan Poleang harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melintasi laut, untuk dapat mengikuti pelatihan. Meski demikian, tingkat kehadiran tetap tinggi dan antusiasme peserta sangat baik.

Keterbatasan waktu pelatihan menjadi salah satu hambatan yang dirasakan, mengingat padatnya materi yang harus disampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, fasilitas pelatihan masih sederhana dan belum sepenuhnya mampu menunjang kebutuhan pembelajaran yang optimal. Meskipun demikian, pelatihan ini tetap menjadi bekal penting bagi anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan proporsional

3.2. Bina Usaha

Pemberdayaan dalam aspek bina usaha berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anggota Satlinmas, baik melalui insentif langsung, bantuan ekonomi produktif, maupun akses terhadap sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa Satlinmas di Kabupaten Bombana belum menerima pemberdayaan dalam bentuk program ekonomi atau keterampilan usaha yang berkelanjutan. Seluruh kegiatan mereka bersifat temporer dan hanya berfokus pada momen Pilkada. Satu-satunya bentuk dukungan yang diterima adalah insentif selama masa pengamanan Pilkada. Nominal insentif yang diberikan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp400.000 per anggota untuk masa kerja 1–2 hari, tergantung kebijakan masing-masing kecamatan dan ketersediaan dana hibah dari KPU yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Insentif ini dipandang tidak proporsional dengan tanggung jawab yang diemban, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah rawan konflik atau lokasi yang sulit dijangkau.

Ketiadaan jaminan sosial, asuransi kerja, serta tunjangan tambahan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan motivasi kerja anggota Satlinmas. Hal ini diperparah oleh tidak adanya program pelatihan keterampilan ekonomi yang dapat memperkuat keberdayaan mereka secara finansial di luar momentum pemilu. Meskipun demikian, loyalitas dan rasa pengabdian dari anggota Satlinmas tetap tinggi karena mereka memandang tugas yang dijalankan sebagai bagian dari kontribusi sosial terhadap daerahnya.

3.3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan merupakan bentuk pemberdayaan yang menekankan pada keterlibatan Satlinmas dalam menciptakan dan menjaga lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif, terutama selama proses Pilkada. Dalam konteks Kabupaten Bombana, anggota Satlinmas berperan aktif dalam mengelola situasi keamanan di sekitar TPS, meredam ketegangan antarpendingung pasangan calon, serta membantu pemilih seperti lansia dan penyandang disabilitas saat hari pemungutan suara.

Penempatan personel Satlinmas disesuaikan dengan peta kerawanan masing-masing kecamatan. Kecamatan seperti Poleang, Rumbia, dan Kabaena dikenal memiliki potensi konflik sosial yang lebih tinggi karena adanya riwayat gesekan politik pada pemilu sebelumnya. Untuk itu, anggota Satlinmas yang bertugas di wilayah tersebut diberikan briefing tambahan dan arahan khusus oleh Satpol PP dan aparat keamanan. Namun, efektivitas mereka dalam menjalankan tugas sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung. Di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar anggota Satlinmas tidak dilengkapi dengan seragam

resmi, tidak memiliki alat komunikasi, dan minim fasilitas transportasi. Akibatnya, mereka harus menggunakan perlengkapan pribadi atau meminjam dari pemerintah desa. Meski demikian, faktor kedekatan sosial Satlinmas dengan masyarakat setempat menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketertiban. Mereka lebih mudah diterima oleh warga, sehingga mampu menengahi konflik secara persuasif dan humanis. Tentunya, keterlibatan langsung warga dalam mekanisme pemilu lokal terbukti memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan stabilitas politik di tingkat akar rumput (Rumi, 2023).

3.4. Bina Kelembagaan

Dalam aspek bina kelembagaan, Satpol PP telah membentuk sistem koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan tugas Satlinmas dalam Pilkada. Penugasan dan pengorganisasian Satlinmas dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Bombana, yang menjadi dasar legal bagi pelibatan mereka. Rekrutmen anggota dilakukan oleh kepala desa atau lurah berdasarkan kriteria usia, kesehatan fisik, dan loyalitas, yang kemudian didaftarkan ke Satpol PP untuk pelatihan.

Kerjasama kelembagaan antara Satpol PP, KPU, Bawaslu, serta kepolisian berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya rapat koordinasi teknis, sosialisasi bersama, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun, kelemahan dalam aspek kelembagaan masih ditemukan, terutama pada level bawah seperti desa dan kelurahan. Tidak semua pemerintah desa memahami mekanisme pembinaan Satlinmas secara prosedural, sehingga pelaksanaannya bergantung pada inisiatif individu kepala desa.

Selain itu, belum adanya sistem evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja Satlinmas menyebabkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Meski demikian, dukungan regulasi seperti Permendagri No. 42 Tahun 2017 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020 menjadi landasan penting dalam penguatan struktur kelembagaan Satlinmas ke depan. Hal ini perlu diikuti dengan pelatihan rutin, pendataan yang akurat, dan penguatan fungsi kelembagaan di tingkat lokal. Adapun daftar anggota Satlinmas tiap kecamatan di Kabupaten Bombana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 121 tahun 2024 tentang pengukuhan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Data Satlinmas Tiap Kecamatan di Kabupaten Bombana

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH LINMAS
1	Kec. Mata Oleo	48 orang
2	Kec. Matausu	13 orang
3	Kec. Masaloka Raya	19 ora ng
4	Kec. Lantari Jaya	52 orang
5	Kec. Rumbia Tengah	42 orang
6	Kec. Rumbia	61 orang
7	Kec. Kabaena	22 orang
8	Kec. Kabaena Selatan	19 orang
9	Kec. Kabaena Barat	37 orang
10	Kec. Kabaena Timur	60 orang
11	Kec. Kabaena Tengah	40 orang
12	Kec. Poleang Barat	76 orang
13	Kec. Poleang Selatan	41 orang
14	Kec. Poleang	90 orang
15	Kec. Poleang Utara	63 orang

17	Kec. Poleang Tengah	25 orang
18	Kec. Tontonunu	35 orang
19	Kec. Poleang Tenggara	25 orang
20	Kec. Poleang Timur	61 orang
21	Kec. Rarowatu	44 orang
22	Kec. Rarowatu Utara	43 orang
JUMLAH		913 Orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bombana, 2024

Tabel diatas menunjukkan jumlah anggota Satlinmas di 22 kecamatan dengan jumlah keseluruhan adalah 913 orang yang akan mengikuti pekatihan dan pembinaan terpusat oleh Satpol PP di Kecamatan Rumbia.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP di Kabupaten Bombana telah dilakukan melalui strategi pembinaan berbasis pendekatan Tri Bina yang mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pelatihan teknis, sosialisasi peran dan fungsi Satlinmas, serta peningkatan kapasitas organisasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pemberdayaan telah dijalankan secara sistematis, namun masih terdapat kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung peran Satlinmas pada momentum Pilkada serentak.

Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, konteks, dan ruang lingkup pemberdayaan. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti Rio Valentino (2023) dan Geraldo Wokas (2022), menyoroti pemberdayaan Satlinmas secara umum dalam menjaga ketertiban masyarakat dan lingkungan, penelitian ini secara khusus mengaitkan pemberdayaan Satlinmas dengan kesiapan mereka dalam menyukseskan Pilkada serentak, yaitu dalam konteks pemilu yang penuh potensi konflik horizontal dan politik lokal yang sangat dinamis. Penelitian Rio Valentino di Kabupaten Kapuas menemukan bahwa banyak kecamatan belum mengaktifkan satuan Satlinmas secara fungsional. Ini serupa dengan kondisi di Bombana, tetapi perbedaan utamanya adalah di Bombana, Satpol PP telah melakukan intervensi langsung melalui pelatihan dan pendataan Satlinmas di setiap kecamatan, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 1.1 skripsi. Sementara itu, penelitian Geraldo Wokas (2022) di Manado lebih menekankan pada pemberdayaan dalam sistem keamanan lingkungan, bukan dalam konteks kepemiluan. Hal ini membuat penelitian ini lebih fokus, kontekstual, dan memiliki kontribusi strategis terhadap pelaksanaan demokrasi lokal. Penelitian selanjutnya seperti Isnan Rasyidi (2021) bahkan menekankan pada minimnya pemahaman terhadap regulasi, terutama Permendagri No. 84 Tahun 2014, dan tidak menyentuh integrasi lintas sektor. Sebaliknya, temuan dalam penelitian ini justru menunjukkan adanya optimalisasi koordinasi antara Satpol PP, KPU, dan stakeholder lain, yang merupakan praktik baik dalam mengatasi keterbatasan internal Satlinmas. Penelitian Karina dkk. (2024) relevan dalam hal peningkatan kapasitas, namun lebih terbatas pada literasi istilah politik. Penelitian kamu melampaui aspek itu dengan mengkaji kesiapan kelembagaan, tanggung jawab moral anggota Satlinmas, serta strategi pembinaan dalam skala kabupaten yang lebih kompleks.

Dengan demikian, keunikan dan kontribusi ilmiah dari penelitian ini tidak hanya terletak pada identifikasi hambatan dan strategi pemberdayaan, tetapi juga pada cara Satpol PP Kabupaten Bombana menerjemahkan teori Tri Bina menjadi langkah-langkah praktis dan adaptif dalam menghadapi tantangan spesifik Pilkada, yang belum banyak disoroti dalam studi-studi sebelumnya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bombana, di antaranya adalah bahwa pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP tidak hanya dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan formal, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, yang memperkuat peran Satlinmas di tingkat lokal. Menariknya, Satlinmas di Bombana tidak hanya difungsikan sebagai penjaga keamanan di TPS, tetapi juga sebagai agen informasi yang membantu menyosialisasikan tahapan Pilkada kepada masyarakat, menunjukkan adanya perluasan peran dari fungsi keamanan ke fungsi edukatif. Selain itu, ditemukan ketimpangan jumlah personel Satlinmas antar kecamatan, yang berdampak pada kesiapan pengamanan di wilayah tertentu, namun Satpol PP berhasil menanggulangi hal tersebut melalui optimalisasi distribusi personel berdasarkan skala prioritas kerawanan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Bombana telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Pemberdayaan ini dilakukan dengan mengacu pada pendekatan Tri Bina dari Sumadyo, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP telah memberikan pelatihan, pembinaan, serta sosialisasi kepada anggota Satlinmas agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pembina langsung dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas. Hambatan dalam penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran, kurangnya personel, kurangnya minat dan partisipasi masyarakat serta kondisi geografis wilayah yang berbeda-beda tiap kecamatan menjadi hambatan Satpol PP dalam melaksanakan pemberdayaan. Namun, segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut seperti mengoptimalkan sumberdaya yang ada, memberikan pelatihan yang intensif kepada anggota Satlinmas serta koordinasi lintas sektor dengan KPU, Bawaslu, TNI/POLRI, serta menyesuaikan strategi penempatan personel Satlinmas berdasarkan tingkat kerawanan daerah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP Kabupaten Bombana telah dilakukan dengan pendekatan yang cukup komprehensif dan adaptif, meskipun masih perlu ditingkatkan dari sisi pendanaan dan fasilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang baik dan pendekatan yang sesuai kebutuhan lokal, pemberdayaan Satlinmas dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, dan damai. Model pemberdayaan ini juga dapat menjadi contoh atau acuan bagi daerah lain dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pengambilan data, yang menyebabkan proses observasi dan wawancara tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berulang. Keterbatasan waktu ini juga membatasi penelusuran dinamika kolaborasi antar instansi dalam jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami bagaimana pemberdayaan Satlinmas oleh Satpol PP dalam menyukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk

dilakukannya studi lanjutan pada konteks dan wilayah yang berbeda seperti penelitian bisa diarahkan untuk melihat tidak hanya peran Satpol PP, tetapi juga bagaimana lembaga lain seperti KPU, Bawaslu, pemerintah desa, dan pihak kepolisian ikut berperan dalam mendukung tugas Satlinmas. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode yang berbeda. Diharapkan penelitian lanjutan dapat lebih mengeksplorasi bagaimana peran masyarakat sipil atau lembaga lainnya dalam pemberdayaan Satlinmas.

V. TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana atas bantuan, kerjasama, serta informasi yang diberikan selama proses penelitian. Dukungan dan keterbukaan dari pihak Satpol PP sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan memahami pelaksanaan pemberdayaan Satlinmas secara langsung di lapangan. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pelaksanaan tugas di masa mendatang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, M. (2023). Civil Society And Political Change In Asia: Expanding And Contracting Democratic Space. *Journal Of Developing Societies*, 39(1), 45–62. <https://journals.sagepub.com/home/jds>
- Brinkerhoff, D. W. (2023). Empowering Local Actors In Democratic Governance: Institutional And Community Dynamics. *Voluntas: International Journal Of Voluntary And Nonprofit Organizations*, 34(2), 215–230. <https://www.springer.com/social+sciences/journal/11266>
- Esponda, I., & Pouliot, V. (2022). Community Empowerment And Security In Electoral Processes: Evidence From Local Interventions. *Journal Of Peacebuilding & Development*, 17(1), 22–35. <https://doi.org/10.1177/15423166221073920>
- Eviany, E., & Sutiyo, 2023. *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka
- Fitriani, R., & Nugroho, D. (2023). Kesiapsiagaan Satlinmas Dalam Menghadapi Risiko Non-Konflik Pada Pelaksanaan Pilkada. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Keamanan*, 14(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jipk.v14i2.5678>
- Geraldo, R. Wokas. (2022). *Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rasyidi, I. (2021). *Pemberdayaan Satlinmas Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*. Universitas Islam Negeri Riau.
- Karina, S. A., Alhasbi, F., & Faruq. (2024). Literasi Istilah Politik Pada Kegiatan Peningkatan Keterampilan Satlinmas Dalam Pemilu 2024 Di Desa Watunggedes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1–8. <https://doi.org/10.46964/etam.v4i3.745>
- Labolo, M. (2013). *Kekosongan Etikalitas Pemerintahan*. Wadi-Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Norris, P., Frank, R. W., & Martinez I Coma, F. (2023). Electoral Integrity And Citizen Security: The Role Of Civil Society During Elections. *International Social Work*, 66(2), 134–150. <http://isw.sagepub.com/>
- Alfajri, R. (2024). *Peningkatan Kapasitas Satlinmas Dalam Menghadapi Pemilihan*

Umum Serentak Di Tahun 2024 Di Desa Karang Bindu Kecamatan Rampak Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Rumi, M. (2023). Community Engagement And Democratic Resilience In Local Elections: Evidence From Southeast Asia. *Pertanika Journal Of Social Sciences & Humanities*, 31(1), 101–118. <http://www.pertanika.upm.edu.my/pjssh>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, E. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4227159>. Bawaslu sebut situasi pilkada lebih rawan dari pemilu. 25 November 2024
- Valentino, R. (2023). *Pemberdayaan Satlinmas Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Oleh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Van Der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2023). Political Trust As An Outcome Of Participatory Local Governance: A Rural Management Perspective. *International Journal Of Rural Management*, 19(1), 55–70. <http://irm.sagepub.com/>

